



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I **2025**

**PENGADILAN
MILITER UTAMA 663161**

JALAN RAYA PENGKILINGAN, CKUNG, JAKARTA TIMUR
WWW.DILMILTAMA.GO.ID
ADMIN@DILMILTAMA.GO.ID
021-48701705



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, www.dilmiltama.go.id, admin@dilmiltama.go.id

Nomor : 817 /SEK.PMU/KU2.1/VII/2025

Jakarta, 24 Juli 2025

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Semester I Tahun 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Jakarta VI
Di Jakarta

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-147/PB/2025 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Pengadilan Militer Utama satuan kerja 663161.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

Nuratiah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer Utama adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 24 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Militer Utama



Nuratih, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	3
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11
B.1 Pendapatan	11
B.2 Belanja Pegawai	14
B.3 Belanja Barang	14
B.4 Belanja Modal	15
B.5 Capaian Output	15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	19

C.2 Persediaan.....	19
C.3 Tanah.....	20
C.4 Peralatan dan Mesin	22
C.5 Gedung dan Bangunan	22
C.6 Aset Tetap Lainnya	23
C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.8 Utang kepada Pihak Ketiga.....	24
C.9 Uang Muka dari KPPN	25
C.10 Ekuitas.....	25
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	26
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
D.2 Beban Pegawai.....	26
D.3 Beban Persediaan	27
D.4 Beban Barang dan Jasa	27
D.5. Beban Pemeliharaan	28
D.6 Beban Perjalanan Dinas	28
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	29
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	31
E.1 Ekuitas Awal	31
E.2 Defisit LO	31
E.3 Transaksi Antar Entitas	31
E.4 Ekuitas Akhir.....	31
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	32
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	32
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	32
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	11
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2025 dan TA 2024	12
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025	12
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.....	13
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024	14
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024	15
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024	15
Tabel 8. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	19
Tabel 9. Rincian Persediaan.....	20
Tabel 10. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025	21
Tabel 11. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
Tabel 12. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.....	27
Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	27
Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	28
Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	29
Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	29
Tabel 17. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.....	29

Pengadilan Militer Utama

Jl. Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur

Telp. 021-48701705 Fax. 021-48701705 e-mail : dilmiltama@dilmil.org

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 24 Juli 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara periode 30 Juni TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.251.000.000,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp25.251.000,00 atau mencapai 100,00 persen.

Realisasi Belanja Negara 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp3.636.577.644,00 atau mencapai 53,80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.759.218.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.362.333.113,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp26.214.000,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp30.336.119.113,00 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp354.528.571,00 dan Rp30.007.804.542,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp25.251.000,00. Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.080.561.759,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.055.310.759,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp4.055.310.759,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp30.451.788.657,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp4.055.310.759,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.611.326.644,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp30.007.804.542,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	25.251.000,00	25.251.000,00	100,00	25.251.000,00	26.173.720,00	103,65
Jumlah Pendapatan		25.251.000,00	25.251.000,00	100,00	25.251.000,00	26.173.720,00	103,65
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	4.233.000.000,00	2.724.365.883,00	64,36	3.404.995.000,00	2.002.947.209,00	58,82
2. Belanja Barang	B.3	2.177.218.000,00	841.311.761,00	38,64	2.171.645.000,00	951.406.480,00	43,81
3. Belanja Modal	B.4	349.000.000,00	70.900.000,00	-	-	-	-
Jumlah Belanja		6.759.218.000,00	3.636.577.644,00	53,80	5.576.640.000,00	2.954.353.689,00	52,98

NERACA

PENGADILAN MILITER UTAMA
NERACA
PER 30 JUNI 2025 dan 31 DESEMBER 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2025	2024
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	20.000.000	-
Persediaan	C. 2	6.214.000	5.626.730
Jumlah Aset Lancar		26.214.000	5.626.730
Aset Tetap			
Tanah	C. 3	25.234.342.000	25.234.342.000
Peralatan dan Mesin	C. 4	6.662.996.332	6.592.096.332
Gedung dan Bangunan	C. 5	5.806.817.600	5.806.817.600
Aset Tetap Lainnya	C. 6	6.940.000	6.940.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 7	(7.374.976.819)	(7.177.171.791)
Jumlah Aset Tetap		30.336.119.113	30.463.024.141
JUMLAH ASET		30.362.333.113	30.468.650.871
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 8	334.528.571	16.862.214
Uang Muka dari KPPN	C. 9	20.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		354.528.571	16.862.214
JUMLAH KEWAJIBAN		354.528.571	16.862.214
EKUITAS			
Ekuitas	C. 10	30.007.804.542	30.451.788.657
JUMLAH EKUITAS		30.007.804.542	30.451.788.657
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		30.362.333.113	30.468.650.871

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN OPERASIONAL
30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		25.251.000	26.173.720
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	25.251.000	26.173.720
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	2.990.494.454	2.253.503.215
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	22.749.730	34.975.250
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	613.831.997	684.586.041
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	243.983.700	269.842.275
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	11.696.850	46.788.835
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	197.805.028	196.713.728
JUMLAH BEBAN		4.080.561.759	3.486.409.344
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.055.310.759)	(3.460.235.624)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(4.055.310.759)	(3.460.235.624)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2025 dan 30 JUNI 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	30.451.788.657,00	30.829.082.886,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(4.055.310.759,00)	(3.460.235.624,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		-	-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 3	3.611.326.644,00	2.928.179.969,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(443.984.115,00)	(532.055.655,00)
EKUITAS AKHIR	E. 4	30.007.804.542,00	30.297.027.231,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; dan
17. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4743/SEK/KU.00/VII/2025 tentang Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2025.

A.2 PROFIL Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer Utama

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Militer Utama*

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2025 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Militer Utama Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2025.

Visi dan Misi Pengadilan Militer Utama

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Militer Utama menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”.

yang bertujuan agar Pengadilan Militer Utama dan Peradilan Militer dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer Utama melakukan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer Utama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrua

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Militer Utama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Militer Utama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer Utama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah

yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70
--------------------------------	----

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer Utama telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 6 (enam) kali dari DIPA awal. Pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	25.251.000	25.251.000
Jumlah Pendapatan	25.251.000	25.251.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.104.000.000	4.233.000.000
Belanja Barang	2.177.218.000	2.177.218.000
Belanja Modal	349.000.000	349.000.000
Jumlah Belanja	6.630.218.000	6.759.218.000

Realisasi

Pendapatan

Rp25.251.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp25.251.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.251.000,00	25.251.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Bruto		25.251.000,00	25.251.000,00	100,00
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		25.251.000,00	25.251.000,00	100,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 sebesar Rp25.251.000,00 merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Sewa ATM BRI sebesar Rp25.251.000,00.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2025 dan TA 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.251.000,00	26.173.720,00	(922.720,00)	-
Jumlah Pendapatan Netto		25.251.000,00	26.173.720,00	(922.720,00)	(3,53)

Belanja

Realisasi

Belanja

Negara

Rp3.636.577.644,00

Realisasi Belanja Pengadilan Militer Utama pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.954.353.689,00 atau 52,98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.576.640.000,00.

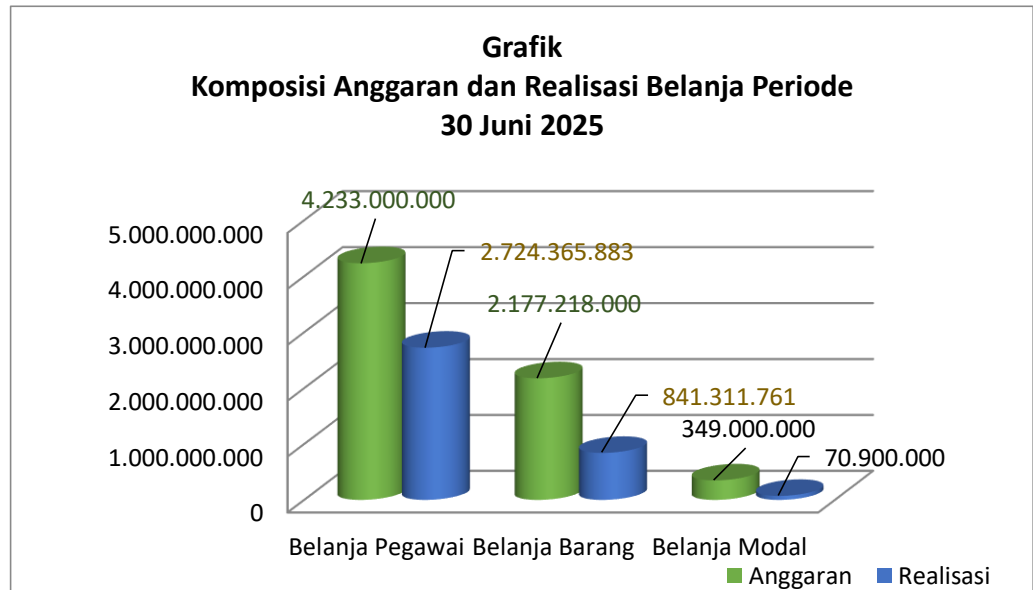
Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	4.233.000.000,00	2.724.365.923,00	64,36
52	Belanja Barang	2.177.218.000,00	841.311.761,00	38,64
53	Belanja Modal	349.000.000,00	70.900.000,00	0,00
Jumlah Belanja Bruto		6.759.218.000,00	3.636.577.684,00	53,80
Pengembalian Belanja		-	40,00	0,00
Jumlah Belanja Netto		6.759.218.000,00	3.636.577.644,00	53,80

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan belanja pegawai dan adanya belanja modal pada Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025. Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	2.724.365.883,00	2.002.947.209,00	721.418.674,00	36,02
52	Belanja Barang	841.311.761,00	951.406.480,00	(110.094.719,00)	(11,57)
53	Belanja Modal	70.900.000,00	-	70.900.000,00	-
Jumlah Belanja Netto		3.636.577.644,00	2.954.353.689,00	682.223.955,00	23,09

B.2 Belanja Pegawai*Belanja**Pegawai**Rp2.724.365.883,00*

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.724.365.883,00 dan Rp2.002.947.209,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp721.418.674,00 atau 36,02 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah pegawai tahun 2025 pada Pengadilan Militar Utama.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	532.866.260,00	457.711.640,00	75.154.620,00	16,42
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.637,00	8.610,00	27,00	0,31
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	34.433.766,00	32.596.968,00	1.836.798,00	5,63
Belanja Tunj. Anak PNS	10.503.195,00	8.368.166,00	2.135.029,00	25,51
Belanja Tunj. Struktural PNS	59.120.000,00	62.900.000,00	(3.780.000,00)	(6,01)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.840.000,00	3.840.000,00	-	1,00
Belanja Tunj. PPh PNS	7.998.467,00	7.431.525,00	566.942,00	7,63
Belanja Tunj. Beras PNS	30.343.980,00	25.491.840,00	4.852.140,00	19,03
Belanja Uang Makan PNS	76.395.000,00	60.854.000,00	15.541.000,00	25,54
Belanja Tunjangan Umum PNS	22.265.000,00	16.490.000,00	5.775.000,00	35,02
Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI	41.360.000,00	1.108.560.000,00	(1.067.200.000,00)	(96,27)
Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	1.088.046,00	131.676.876,00	(130.588.830,00)	(99,17)
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	237.103.740,00	-	237.103.740,00	-
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.561.600.000,00	-	1.561.600.000,00	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	76.886.400,00	76.886.400,00	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.112,00	1.172,00	(60,00)	(5,12)
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.562.880,00	2.562.880,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	12.424.000,00	12.424.000,00	-	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	2.317.440,00	2.317.440,00	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	11.248.000,00	11.026.000,00	222.000,00	2,01
Realisasi Belanja Bruto	2.724.365.923,00	2.021.147.517,00	(1.095.707.274,00)	(54,21)
Pengembalian	40,00	560,00	(520,00)	-
Realisasi Belanja Netto	2.724.365.883,00	2.021.146.957,00	703.218.926,00	34,79

B.3 Belanja Barang*Belanja**Barang**Rp841.311.761,00*

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp841.311.761,00 dan Rp951.406.480,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp110.094.719,00 atau 11,57 persen dibandingkan dengan realisasi

Belanja Barang periode 30 Juni 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	459.939.924,00	538.698.900,00	(78.758.976,00)	(14,62)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Belanja Barang Persediaan	23.337.000,00	27.361.000,00	(4.024.000,00)	(14,71)
Belanja Jasa	101.354.287,00	84.210.470,00	17.143.817,00	20,36
Belanja Pemeliharaan	243.983.700,00	254.647.275,00	(10.663.575,00)	(4,19)
Belanja Perjalanan Dinas	11.696.850,00	46.488.835,00	(34.791.985,00)	(74,84)
Realisasi Belanja Bruto	841.311.761,00	951.406.480,00	(110.094.719,00)	(11,57)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	841.311.761,00	951.406.480,00	(110.094.719,00)	(11,57)

B.4 Belanja Modal

Belanja

Modal

Rp70.900.000,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp70.900.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.900.000,00	-	70.900.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	70.900.000,00	-	70.900.000,00	100,00
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	70.900.000,00	-	70.900.000,00	100,00

B.5. Capaian Output Satuan Kerja

Selama periode Semester I Tahun 2025, output satuan kerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	%	
WA	Program Dukungan Manajemen	6.759.218.000	3.636.577.684	53.8%					
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	349.000.000	70.900.000	20.32%					
951	Layanan Sarana Internal	72.000.000	70.900.000	98.47%	8.0	Unit	10.0	100%	Belanja Modal AC sudah dilaksanakan
971	Layanan Prasarana Internal	277.000.000	0	0%	1.0	Unit	0.0	10%	Sedang mengajukan revisi ke Eselon I MA RI
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.410.218.000	3.565.677.684	55.62%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.409.918.000	3.565.377.684	55.62%					
962	Layanan Umum	700.000	700.000	100%	1.0	Laporan	1.0	100%	Belanja Ekstrakomptabel printer sejumlah 1 unit sudah dilaksanakan Bulan April 2025

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA SEMESTER I TAHUN 2025

994	Layanan Perkantoran	6.409.218.000	3.564.677.684	55,62%	1.0	Layanan	0.0	55.62%	Pembayaran Gaji dan Operasional Perkantoran Bulan Juni 2025
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	300.000	100%					
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100%	1.0	Dokumen	1.0	100%	Layanan Pemantauan dan Evaluasi sudah dilaksanakan

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp20.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 8. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	20.000.000,00	0,00
	Jumlah	20.000.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Militer Utama per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Uang Tunai	Rp 20.000.000,00
2	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp -
3	Di rekening	Rp -
	Total	Rp 20.000.000,00
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	<u>Kas di Bendahara Pengeluaran</u>	<u>Rp 20.000.000,00</u>

C.2 Persediaan

Persediaan
Rp6.214.000,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.214.000,00 dan Rp5.626.730,00,

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	30 Juni 2025
1	Barang Konsumsi	5.626.730,00	587.270,00	6.214.000,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		5.626.730,00	587.270,00	6.214.000,00

C.3 Tanah

Tanah

Rp25.234.342.000,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Militer Utama per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.234.342.000,00 dan Rp25.234.342.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	25.234.342.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	25.234.342.000,00

Tabel 10. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	090441003400346 Tanggal 02-08-2007	Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	3.000	25.234.342.000,00
Jumlah Halaman I					3.000	25.234.342.000,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp6.662.996.
332,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp6.662.996.332,00 dan Rp6.592.096.332,00 .

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	6.592.096.332
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Tansfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2025	6.662.996.332
Akumulasi Penyusutan	(6.297.807.579)
Nilai Buku	365.188.753

Gedung dan
Bangunan
Rp5.806.817.
600,00

C.5 Gedung dan Bangunan Pengadilan Militer Utama

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp5.806.817.600,00 dan Rp5.806.817.600,00 .

Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	5.806.817.600,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2025	5.806.817.600,00
Akumulasi Penyusutan	(1.077.169.240,00)
Nilai Buku	4.729.648.360,00

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp6.940.000,
00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp6.940.000,00 dan Rp6.940.000,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	6.940.000,00
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2025	6.940.000,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	6.940.000,00

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp7.374.976.
819,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp7.374.976.819,00 dan Rp7.177.171.791,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 11. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.662.996.332	(6.297.807.579)	365.188.753
2	Gedung dan Bangunan	5.806.817.600	(1.077.169.240)	4.729.648.360
3	Aset Tetap Lainnya	6.940.000	-	6.940.000
Jumlah		12.476.753.932	(7.374.976.819)	5.101.777.113

C.8 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp334.528.571,00 dan Rp16.862.214,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga:

No	Akun	Uraian	Jumlah	Penjelasan
A	Belanja Pegawai		280.933.571	
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	69.927.860	Gaji Induk Bulan Juli 2025
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.059	
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	4.554.656	
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1.372.909	
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	7.390.000	
6	511124	BelanjaTunjangan Fungsional PNS	480.000	
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	204.517	
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.983.100	
9	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2.945.000	
10	511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI	5.170.000	
11	511225	Belanja PPh Tunjangan Fungsional TNI	181.341	
12	511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	29.049.157	
13	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	143.900.000	
14	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.610.800	
15	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	132	
16	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	320.360	
17	511624	BelanjaTunjangan Fungsional PPPK	1.553.000	
18	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680	
B	Belanja Barang		53.595.000	
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Honor PPNPN)	53.595.000	Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2025

		Jumlah	334.528.571	
--	--	--------	-------------	--

C.9 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN Rp20.000.000,00

,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.10 Ekuitas

Ekuitas Rp30.007.804.542,00

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.007.804.542,00 dan Rp30.451.788.657,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp25.251.000,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp25.251.000,00 dan Rp26.173.720,00. Pendapatan berupa Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan untuk ATM BRI.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2.990.494.454,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.990.494.454,00 dan Rp2.253.503.215,00 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12. *Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	602.794.120,00	519.226.220,00	16,09
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	9.656,00	9.516,00	1,47
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	38.988.422,00	36.896.234,00	5,67
4	Beban Tunj. Anak PNS	11.876.104,00	9.471.526,00	25,39
5	Beban Tunj. Struktural PNS	66.510.000,00	70.290.000,00	(5,38)
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	-
7	Beban Tunj. PPh PNS	8.202.984,00	7.634.785,00	7,44
8	Beban Tunj. Beras PNS	34.327.080,00	28.968.000,00	18,50
9	Beban Uang Makan PNS	63.477.000,00	51.372.000,00	23,56
10	Beban Tunjangan Umum PNS	25.210.000,0	19.060.000,0	32,27
11	Beban Tunjangan Fungsional TNI	46.530.000,00	1.234.430.000,00	(96,23)
12	Beban Tunjangan PPh TNI	1.269.387,00	156.683.070,00	(99,19)
13	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	266.152.897,00	-	-
14	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.705.500.000,00	-	-
15	Beban Gaji Pokok PPPK	86.497.200,00	86.497.200,00	-
16	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.244,00	1.304,00	(4,60)
17	Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.883.240,00	2.883.240,00	-
18	Beban Tunj. Fungsional PPPK	13.977.000,00	13.977.000,00	-
19	Beban Tunj. Beras PPPK	2.607.120,00	2.607.120,00	-
20	Beban Uang Makan PNS	9.361.000,00	9.176.000,00	2,02
21	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	-
Total		2.990.494.454,00	2.253.503.215,00	32,70

Beban Pegawai tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp736.991.239,00 atau sebesar 32,70 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024, karena ada peningkatan jumlah pegawai tahun 2025 pada Pengadilan Militer Utama.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp22.749.730,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.749.730,00 dan Rp34.975.250,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 13. *Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	22.749.730,00	34.975.250,00	(34,95)
Total		22.749.730,00	34.975.250,00	(34,95)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp613.831.997,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp613.831.997,00 dan Rp684.586.041,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	484.205.924,00	573.439.900,00	(15,56)
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.029.000,00	5.229.500,00	(42,08)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26.300.000,00	18.120.000,00	45,14
4	Beban Barang Operasional Lainnya	300.000,00	345.000,00	(13,04)
5	Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	700.000,00	0,00	-
6	Beban Langganan Telepon	488.843,00	1.065.591,00	(54,12)
7	Beban Langganan Air	9.774.230,00	6.736.050,00	45,10
8	Beban Sewa	88.734.000,00	79.050.000,00	12,25
9	Beban Jasa Lainnya	300.000,00	600.000,00	(50,00)
Total		613.831.997,00	684.586.041,00	(10,34)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp243.983.700,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp243.983.700,00 dan Rp269.842.275,00 . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97.153.200,00	95.555.000,00	1,67
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.830.500,00	174.287.275,00	(15,75)
Total		243.983.700,00	269.842.275,00	(9,58)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.696.850,00 dan Rp46.788.835,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	10.196.850,00	28.795.641,00	(64,59)
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.500.000,00	6.300.000,00	(76,19)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	11.693.194,00	-
Total		11.696.850,00	46.788.835,00	(75,00)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp197.805.028,00 dan Rp196.713.728,00 . Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130.238.623,00	129.147.323,00	0,85
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67.566.405,00	67.566.405,00	-
Jumlah Penyusutan		197.805.028,00	196.713.728,00	0,55

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp30.451.788.657
,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.451.788.657,00 dan Rp30.829.082.886,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp4.055.310.759,
00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah defisit sebesar Rp4.055.310.759,00 dan Rp3.460.235.624,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas*
Rp3.611.326.644,
00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.611.326.644,00 dan Rp2.928.179.969,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.636.577.644,00
Diterima dari Entitas Lain	(25.251.000,00)
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
	3.611.326.644,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp25.251.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp3.636.577.644 ,00.

E.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp30.007.804.542,
00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.007.804.542,00 dan Rp30.297.027.231,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Militer Utama yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Militer Utama.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama
Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer Utama adalah BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JAKARTA JATINEGARA A/C 653246631611000 a.n. BPG175PENGADILAN MILITER UTAMA 663161 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00
2. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/KPMU/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 221/SEK.PMU/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Pengadilan Militer Utama Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran : Nuratiah, S.H., M.H.
 - b. PPK : Try Susanti, S.E.
 - c. PPSPM : Dwi Mulyanto, S.E., M.M.
 - d. Bendahara Pengeluaran : Noviani Nistria Susanti

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 25/07/25 12:27 PM
Tgl Cetak : 25/07/25 2:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		3,000	25,234,342,000	0	0	0	25,234,342,000
2010104026	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	M2	3,000	25,234,342,000	0	0	0	25,234,342,000
132111	Peralatan dan Mesin		927	6,662,996,332	(6,167,568,956)	(130,238,623)	(6,297,807,579)	365,188,753
3020101001	Sedan	Unit	4	981,321,612	(981,321,612)	0	(981,321,612)	0
3020101003	Station Wagon	Unit	1	311,600,000	(311,600,000)	0	(311,600,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	319,249,000	(319,249,000)	0	(319,249,000)	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	103,697,000	(103,697,000)	0	(103,697,000)	0
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	1	5,500,000	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,200,000	(1,200,000)	0	(1,200,000)	0
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	5	45,963,764	(45,963,764)	0	(45,963,764)	0
3050101004	Mesin Ketik Listrik	Buah	2	4,119,500	(4,119,500)	0	(4,119,500)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	2	148,900,000	(148,900,000)	0	(148,900,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	30	80,540,000	(77,740,000)	(400,000)	(78,140,000)	2,400,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	12	143,796,332	(143,796,332)	0	(143,796,332)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	2	11,940,800	(11,940,800)	0	(11,940,800)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	5	16,657,520	(16,657,520)	0	(16,657,520)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	20	37,325,500	(37,325,500)	0	(37,325,500)	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	18	27,573,480	(27,573,480)	0	(27,573,480)	0
3050104007	Brandkas	Buah	2	24,107,169	(24,107,169)	0	(24,107,169)	0
3050104014	Mobile File	Buah	2	60,442,000	(60,442,000)	0	(60,442,000)	0
3050104020	Lemari Display	Buah	1	5,940,000	(5,940,000)	0	(5,940,000)	0
3050104029	Box Camera	unit	1	1,830,945	(915,473)	(183,094)	(1,098,567)	732,378
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	12,105,000	(12,105,000)	0	(12,105,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	32	75,094,056	(53,034,527)	(4,411,904)	(57,446,431)	17,647,625
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	4,145,000	(2,745,000)	(200,000)	(2,945,000)	1,200,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	5,169,000	(5,169,000)	0	(5,169,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	13,280,000	(8,450,000)	(690,000)	(9,140,000)	4,140,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	2	5,989,000	(5,989,000)	0	(5,989,000)	0
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	2	4,850,000	(2,425,000)	(485,000)	(2,910,000)	1,940,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	70	562,547,446	(562,547,446)	0	(562,547,446)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	176	131,938,300	(131,938,300)	0	(131,938,300)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	11	35,940,300	(35,940,300)	0	(35,940,300)	0
3050201005	Sice	Buah	31	77,277,000	(77,277,000)	0	(77,277,000)	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	6	12,533,400	(12,533,400)	0	(12,533,400)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	4	50,974,143	(50,974,143)	0	(50,974,143)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	26	42,323,600	(42,323,600)	0	(42,323,600)	0
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	19	41,465,000	(26,065,000)	(3,080,000)	(29,145,000)	12,320,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 25/07/25 12:27 PM
Tgl Cetak : 25/07/25 2:34 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

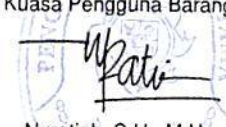
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	2	6,963,000	(6,963,000)	0	(6,963,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	2	24,155,842	(24,155,842)	0	(24,155,842)	0
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	5,170,000	(5,170,000)	0	(5,170,000)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	41	41,245,600	(41,245,600)	0	(41,245,600)	0
3050201025	Gantungan Jas	Buah	2	974,600	(974,600)	0	(974,600)	0
3050201033	Sofa	set	2	9,400,000	(4,700,000)	(940,000)	(5,640,000)	3,760,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	30	347,228,827	(347,228,827)	0	(347,228,827)	0
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	4	5,885,000	(5,885,000)	0	(5,885,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	6	30,954,180	(30,954,180)	0	(30,954,180)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	64	361,027,200	(225,237,200)	(16,360,000)	(241,597,200)	119,430,000
3050206002	Televisi	Buah	11	83,231,000	(77,261,000)	(1,990,000)	(79,251,000)	3,980,000
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	10,947,500	(10,947,500)	0	(10,947,500)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	8	18,400,000	(15,730,000)	(890,000)	(16,620,000)	1,780,000
3050206008	Sound System	Buah	3	44,030,800	(42,335,800)	(565,000)	(42,900,800)	1,130,000
3050206013	Megaphone	Buah	1	4,000,000	(4,000,000)	0	(4,000,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	11	13,750,000	(9,625,000)	(1,375,000)	(11,000,000)	2,750,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	1	1,387,500	(693,750)	(138,750)	(832,500)	555,000
3050206020	Camera Video	Buah	1	6,996,666	(6,996,666)	0	(6,996,666)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	3	1,983,300	(1,983,300)	0	(1,983,300)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	3	1,293,600	(1,293,600)	0	(1,293,600)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	8	18,623,000	(18,623,000)	0	(18,623,000)	0
3050206033	Water Filter	Buah	1	4,475,828	(4,475,828)	0	(4,475,828)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	5,317,000	(5,317,000)	0	(5,317,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	18	38,322,500	(38,322,500)	0	(38,322,500)	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	3,300,000	(3,300,000)	0	(3,300,000)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	4,475,828	(4,475,828)	0	(4,475,828)	0
3050206078	Bingkai Foto	Buah	1	12,375,000	(12,375,000)	0	(12,375,000)	0
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	1,980,000	(1,980,000)	0	(1,980,000)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	12	12,000,000	(12,000,000)	0	(12,000,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	55,125,000	(53,848,500)	(255,300)	(54,103,800)	1,021,200
3060101060	Power Amplifier	Buah	1	41,200,500	(41,200,500)	0	(41,200,500)	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	3	1,515,616	(1,515,616)	0	(1,515,616)	0
3060102057	Slide Projector	Buah	1	29,978,500	(29,978,500)	0	(29,978,500)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	2	42,628,500	(38,096,000)	(906,500)	(39,002,500)	3,626,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	5	17,441,252	(13,137,502)	(860,750)	(13,998,252)	3,443,000
3060102151	Splitter	Buah	1	1,815,000	(1,815,000)	0	(1,815,000)	0
3060102165	Camera Conference	Buah	1	51,500,000	(36,050,000)	(5,150,000)	(41,200,000)	10,300,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 25/07/25 12:27 PM
Tgl Cetak : 25/07/25 2:34 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060105010	Contact Printer	Buah	3	89.885.322	(89.885.322)	0	(89.885.322)	
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	21.230.000	(21.230.000)	0	(21.230.000)	
3060201010	Facsimile	Buah	8	25.449.000	(25.449.000)	0	(25.449.000)	
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	2	13.950.000	(13.950.000)	0	(13.950.000)	
3060209007	Digital Recording System	Buah	1	14.652.000	(7.326.000)	(1.465.200)	(8.791.200)	5.860.800
3060323015	Switcher/Patch Panel	Buah	2	12.720.000	(12.720.000)	0	(12.720.000)	
3060347002	Genset	Buah	1	316.380.000	(205.647.000)	(15.819.000)	(221.466.000)	94.914.000
3100102001	P.C Unit	Buah	44	576.087.004	(540.549.504)	(33.850.000)	(574.399.504)	1.687.500
3100102002	Lap Top	Buah	33	466.322.666	(419.161.416)	(20.928.750)	(440.090.166)	26.232.500
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	5	36.500.000	(36.500.000)	0	(36.500.000)	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	47	124.823.430	(115.110.930)	(3.587.500)	(118.698.430)	6.125.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	58.327.904	(38.984.154)	(4.181.250)	(43.165.404)	15.162.500
3100204001	Server	Buah	2	124.630.000	(92.867.500)	(10.587.500)	(103.455.000)	21.175.000
3100204002	Router	Buah	1	6.100.000	(6.100.000)	0	(6.100.000)	
3100204014	Rak Server	Buah	1	7.505.000	(4.690.625)	(938.125)	(5.628.750)	1.876.250
133111	Gedung dan Bangunan		1	5.806.817.600	(1.009.602.835)	(67.566.405)	(1.077.169.240)	4.729.648.360
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	(1.009.602.835)	1.009.602.835	0	0
4010124002	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding	UNIT	1	5.806.817.600	0	(1.077.169.240)	(1.077.169.240)	4.729.648.360
135121	Aset Tetap Lainnya		3	6.940.000	0	0	0	6.940.000
6010101001	Monografi	Buah	3	6.940.000	0	0	0	6.940.000
JUMLAH			3,931	37,711,095,932	(7,177,171,791)	(197,805,028)	(7,374,976,819)	30,336,119,113

Jakarta, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 25/07/25 12:27 PM
Tgl Cetak : 25/07/25 2:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		132	35,145,452	(24,628,502)	(1,734,590)	(26,363,092)	8,782,360
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	2.640.000	(861.000)	(264.000)	(1.125.000)	1.515.000
3050104003	Rak Besi	Buah	2	999.900	(499.950)	(99.990)	(599.940)	399.960
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	950.000	(475.000)	(95.000)	(570.000)	380.000
3050105056	Panic Button System, Alarm Indicator	Buah	1	500.000	(250.000)	(50.000)	(300.000)	200.000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummiy	11	3.926.000	(1.963.000)	(392.600)	(2.355.600)	1.570.400
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2	1.730.000	(692.000)	(173.000)	(865.000)	865.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	18	5.725.000	(1.913.000)	(572.500)	(2.485.500)	3.239.500
3050201009	Meja Komputer	Buah	10	1.425.000	(1.425.000)	0	(1.425.000)	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	25	4.125.000	(4.125.000)	0	(4.125.000)	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	54	11.394.676	(11.394.676)	0	(11.394.676)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	2	470.800	(470.800)	0	(470.800)	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	559.076	(559.076)	0	(559.076)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	700.000	0	(87.500)	(87.500)	612.500
JUMLAH			132	35,145,452	(24,628,502)	(1,734,590)	(26,363,092)	8,782,360

Jakarta, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN MILITER UTAMA
KODE UAKPB : 663161

TANGGAL : 24-07-2025
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 24 JULI 2025
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Nuratiah, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005
UAKPB : 663161

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN MILITER UTAMA**

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tanggal : 24/07/25 12:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

Jakarta, 24 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang


Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005





Tgl Data : 23/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 23/07/25 3:01 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	25,251,000	25,251,000	0	100.00	25,251,000	26,173,720	922,720	103.65
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,251,000	25,251,000	0	100.00	25,251,000	26,173,720	922,720	103.65
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	25,251,000	25,251,000	0	100.00	25,251,000	26,173,720	922,720	103.65
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,759,218,000	3,636,577,644	(3,122,640,356)	53.80	5,576,640,000	2,954,353,689	(2,622,286,311)	52.98
1. Belanja Pegawai	4,233,000,000	2,724,365,883	(1,508,634,117)	64.36	3,404,995,000	2,002,947,209	(1,402,047,791)	58.82
2. Belanja Barang	2,177,218,000	841,311,761	(1,335,906,239)	38.64	2,171,645,000	951,406,480	(1,220,238,520)	43.81
3. Belanja Modal	349,000,000	70,900,000	(278,100,000)	20.32	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**




KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER UTAMA 663161

Tgl Data : 23/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 23/07/25 3:01 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,759,218,000	3,636,577,644	(3,122,640,356)	53.80	5,576,640,000	2,954,353,689	(2,622,286,311)	52.98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 1:09 PM
 Tgl Cetak : 23/07/25 3:02 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0	20,000,000	0.00
Persediaan	6,214,000	5,626,730	587,270	10.44
JUMLAH ASET LANCAR	26,214,000	5,626,730	20,587,270	365.88
ASET TETAP				
Tanah	25,234,342,000	25,234,342,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,662,996,332	6,592,096,332	70,900,000	1.08
Gedung dan Bangunan	5,806,817,600	5,806,817,600	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	6,940,000	6,940,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,374,976,819)	(7,177,171,791)	(197,805,028)	2.76
JUMLAH ASET TETAP	30,336,119,113	30,463,024,141	(126,905,028)	(0.42)
JUMLAH ASET	30,362,333,113	30,468,650,871	(106,317,758)	(0.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	334,528,571	16,862,214	317,666,357	1,883.89
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0	20,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	354,528,571	16,862,214	337,666,357	2,002.50
JUMLAH KEWAJIBAN	354,528,571	16,862,214	337,666,357	2,002.50
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,007,804,542	30,451,788,657	(443,984,115)	(1.46)
JUMLAH EKUITAS	30,007,804,542	30,451,788,657	(443,984,115)	(1.46)
JUMLAH EKUITAS	30,007,804,542	30,451,788,657	(443,984,115)	(1.46)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,362,333,113	30,468,650,871	(106,317,758)	(0.35)

Keterangan :
 FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nurathia, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda 197109051998032005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 1:09 PM
 Tgl Cetak : 23/07/25 3:01 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,251,000	26,173,720	(922,720)	(3.525)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,251,000	26,173,720	(922,720)	(3.525)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,251,000	26,173,720	(922,720)	(3.525)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,990,494,454	2,253,503,215	736,991,239	32.704
Beban Persediaan	22,749,730	34,975,250	(12,225,520)	(34.955)
Beban Barang dan Jasa	613,831,997	684,586,041	(70,754,044)	(10.335)
Beban Pemeliharaan	243,983,700	269,842,275	(25,858,575)	(9.583)
Beban Perjalanan Dinas	11,696,850	46,788,835	(35,091,985)	(75.001)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 1:09 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 3:01 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	197,805,028	196,713,728	1,091,300	0.555
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,080,561,759	3,486,409,344	594,152,415	17.042
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,055,310,759)	(3,460,235,624)	(595,075,135)	17.198
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,055,310,759)	(3,460,235,624)	(595,075,135)	17.198
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,055,310,759)	(3,460,235,624)	(595,075,135)	17.198

Keterangan :

FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 3:01 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,451,788,657	30,829,082,886	(377,294,229)	(1.22)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,055,310,759)	(3,460,235,624)	(595,075,135)	17.2
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,611,326,644	2,928,179,969	683,146,675	23.33
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(443,984,115)	(532,055,655)	88,071,540	(16.55)
EKUITAS AKHIR	30,007,804,542	30,297,027,231	(289,222,689)	(0.95)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/07/25 3:02 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251 425131	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25,251,000	25,251,000	0	25,251,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	25,251,000	25,251,000	0	25,251,000	100
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	25,251,000	25,251,000	0	25,251,000	100
	JUMLAH PENDAPATAN	25,251,000	25,251,000	0	25,251,000	100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 663161 **PENGADILAN MILITER UTAMA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/25 3:02 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/7/25 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	704,406,000	704,406,000	532,866,260	0	532,866,260	75.65	171,539,740
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,000	8,000	8,637	40	8,597	107.46	(597)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,281,000	42,281,000	34,433,766	0	34,433,766	81.44	7,847,234
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,327,000	10,327,000	10,503,195	0	10,503,195	101.71	(176,195)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	42,336,000	42,336,000	59,120,000	0	59,120,000	139.64	(16,784,000)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,720,000	6,720,000	3,840,000	0	3,840,000	57.14	2,880,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,640,000	3,640,000	7,998,467	0	7,998,467	219.74	(4,358,467)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,282,000	30,282,000	30,343,980	0	30,343,980	100.2	(61,980)
511129	Belanja Uang Makan PNS	106,476,000	149,476,000	76,395,000	0	76,395,000	51.11	73,081,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18,889,000	18,889,000	22,265,000	0	22,265,000	117.87	(3,376,000)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	965,365,000	1,008,365,000	777,774,305	40	777,774,265	77.13	230,590,735
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri							
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	329,375,000	286,375,000	41,360,000	0	41,360,000	14.44	245,015,000
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	50,950,000	50,950,000	1,088,046	0	1,088,046	2.14	49,861,954
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	380,325,000	337,325,000	42,448,046	0	42,448,046	12.58	294,876,954
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	555,200,000	555,200,000	237,103,740	0	237,103,740	42.71	318,096,260
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,018,200,000	2,147,200,000	1,561,600,000	0	1,561,600,000	72.73	585,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	2,573,400,000	2,702,400,000	1,798,703,740	0	1,798,703,740	66.56	903,696,260
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	126,000,000	126,000,000	76,886,400	0	76,886,400	61.02	49,113,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,000	10,000	1,112	0	1,112	11.12	8,888
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,200,000	4,200,000	2,562,880	0	2,562,880	61.02	1,637,120
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21,800,000	21,800,000	12,424,000	0	12,424,000	56.99	9,376,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,100,000	4,100,000	2,317,440	0	2,317,440	56.52	1,782,560
511628	Belanja Uang Makan PPPK	28,800,000	28,800,000	11,248,000	0	11,248,000	39.06	17,552,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	184,910,000	184,910,000	105,439,832	0	105,439,832	57.02	79,470,168
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,104,000,000	4,233,000,000	2,724,365,923	40	2,724,365,883	64.36	1,508,634,117
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,033,545,000	1,033,575,000	430,610,924	0	430,610,924	41.66	602,964,076
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,600,000	27,600,000	3,029,000	0	3,029,000	10.97	24,571,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 663161 **PENGADILAN MILITER UTAMA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/25 3:02 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/7/25 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63,120,000	63,120,000	26,300,000	0	26,300,000	41.67	36,820,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,124,265,000	1,124,295,000	459,939,924	0	459,939,924	40.91	664,355,076
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,440,000	60,410,000	23,337,000	0	23,337,000	38.63	37,073,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	60,440,000	60,410,000	23,337,000	0	23,337,000	38.63	37,073,000
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	30,000,000	30,000,000	705,787	0	705,787	2.35	29,294,213
522113	Belanja Langganan Air	36,000,000	36,000,000	11,614,500	0	11,614,500	32.26	24,385,500
522141	Belanja Sewa	172,440,000	172,440,000	88,734,000	0	88,734,000	51.46	83,706,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,200,000	3,200,000	300,000	0	300,000	9.38	2,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	241,640,000	241,640,000	101,354,287	0	101,354,287	41.94	140,285,713
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	264,960,000	264,960,000	97,153,200	0	97,153,200	36.67	167,806,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406,037,000	406,037,000	146,830,500	0	146,830,500	36.16	259,206,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	670,997,000	670,997,000	243,983,700	0	243,983,700	36.36	427,013,300
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,976,000	53,976,000	10,196,850	0	10,196,850	18.89	43,779,150
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,900,000	24,900,000	1,500,000	0	1,500,000	6.02	23,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	78,876,000	78,876,000	11,696,850	0	11,696,850	14.83	67,179,150
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,177,218,000	2,177,218,000	841,311,761	0	841,311,761	38.64	1,335,906,239
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72,000,000	72,000,000	70,900,000	0	70,900,000	98.47	1,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	72,000,000	72,000,000	70,900,000	0	70,900,000	98.47	1,100,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	277,000,000	277,000,000	0	0	0	0	277,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	277,000,000	277,000,000	0	0	0	0	277,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	349,000,000	349,000,000	70,900,000	0	70,900,000	20.32	278,100,000
	JUMLAH BELANJA	6,630,218,000	6,759,218,000	3,636,577,684	40	3,636,577,644	53.8	3,122,640,356

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 1:09 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 3:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,214,000	0
0.0	131111	Tanah	25,234,342,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,662,996,332	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,806,817,600	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,297,807,579
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,077,169,240
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	280,933,571
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	53,595,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,636,577,644
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	25,251,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	30,451,788,657
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	25,251,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	602,794,120	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,656	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	38,988,422	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	11,876,104	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	66,510,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,320,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,202,984	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	34,327,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	63,477,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	25,210,000	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	46,530,000	0
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	1,269,387	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	266,152,897	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,705,500,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	86,497,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,244	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,883,240	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	13,977,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,607,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	9,361,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	484,205,924	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,029,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26,300,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 23/07/25 3:02 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	488,843	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,774,230	0
3.0	522141	Beban Sewa	88,734,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97,153,200	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146,830,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,196,850	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130,238,623	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67,566,405	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	22,749,730	0
JUMLAH			41,843,122,691	41,843,122,691

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 3:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,636,577,644
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	25,251,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	25,251,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	532,866,260	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,637	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	34,433,766	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,503,195	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	59,120,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,840,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,998,467	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,343,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	76,395,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	22,265,000	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	41,360,000	0
3.0	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	1,088,046	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	237,103,740	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,561,600,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	76,886,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,112	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,562,880	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,424,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,317,440	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,248,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	430,610,924	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,029,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	26,300,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,337,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	705,787	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	11,614,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	88,734,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97,153,200	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146,830,500	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,196,850	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,900,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 3:02 PM

Halaman : 2


lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	40
JUMLAH			3,661,828,684	3,661,828,684

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris Pengadilan Militer Utama


Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 24/07/25 3:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,167,750	0
0.0	131111	Tanah	25,234,342,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,574,496,332	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,806,817,600	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,044,420,330
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	942,036,430
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	388,627,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	388,627,800
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	261,888,006
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	79,391,685
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	25,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,954,353,689
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	26,173,720	0
0.0	391111	Ekuitas	0	30,829,082,886
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,173,720
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	519,226,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,516	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	36,896,234	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,471,526	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	70,290,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,320,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,634,785	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	28,968,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	51,372,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,060,000	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1,234,430,000	0
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	156,683,070	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	86,497,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,304	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,883,240	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	13,977,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,607,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	9,176,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	573,439,900	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,229,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,120,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM
Tgl Cetak : 24/07/25 3:58 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	345,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,065,591	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,736,050	0
3.0	522141	Beban Sewa	79,050,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95,555,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174,287,275	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28,795,641	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,300,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,693,194	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	129,147,323	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67,566,405	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	34,975,250	0
JUMLAH			41,550,974,546	41,550,974,546

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 24 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris Pengadilan Militar Utama

Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 24/07/25 3:58 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,954,353,689
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	26,173,720	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,173,720
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	457,711,640	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,610	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	32,596,968	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	8,368,166	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	62,900,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,840,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,431,525	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	25,491,840	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	60,854,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,490,000	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1,108,560,000	0
3.0	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	131,676,876	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	76,886,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,172	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,562,880	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,424,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,317,440	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,026,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	515,245,400	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,988,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,120,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	345,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,361,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,061,220	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,999,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	74,550,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93,755,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160,892,275	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,795,641	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,693,194	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	308
3.1	511224	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	18,200,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 24/07/25 3:58 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			2,998,727,717	2,998,727,717

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 24 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris Pengadilan Militer Utama


Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

DAFTAR REKENING BANK (BENDAHARA PENGELUARAN, REKENING LAINNYA/ BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA)
PENGADILAN MILITER UTAMA
30 JUNI 2025

No.	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening Atas Nama	Bank / Kantor Pos	Surat Izin		TNP / NON TNP	Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp.)
									Nomor	Tanggal		
1	Pengadilan Militer Utama	005	01	Virtual	653246631611000	BPG175 Pengadilan Militer Utama 663161	Pengadilan Militer Utama	BRI Cabang Jakarta Jatinegara	S-985/WPB.12/KP.06/2021	07-06-2021		Rp -
2	Pengadilan Militer Utama	005	05	Virtual	651556631621000	BPG175 Pengadilan Militer Utama 663162	Pengadilan Militer Utama	BRI Cabang Jakarta Jatinegara	S-549/PB.3/2021	26-03-2021		Rp -

Jakarta, 24 Juli 2025
 Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.
 NIP. 197109051998032005

**MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK PADA PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN 2025**

No.	Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank	Tgl Penutupan	Saldo yang disetor	Tgl dan Surat Bank	Keterangan
TIDAK ADA							

Jakarta, 24 Juli 2025
Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 30 Juni 2025				Ket
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	20.000.000	-	BRI Cabang Jakarta Jatinegara 653246631611000	-	
Total					20.000.000	-	-	-	

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 30 Juni 2025				Ket
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	-	-	-	-	-
Total					-	-	-	-	

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerimaan

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 30 Juni 2025				Ket
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	-	-	-	-	-
Total					-	-	-	-	

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris



Nurathia, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 30 Juni 2025				Ket
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	-	-	-	-	-
Total					-	-	-	-	

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

**DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG PNBP
PER 30 JUNI 2025**

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNB	Nilai Agunan/ Sitaan Yang Diperhitungkan	Saldo Piutang Setelah Agunan/ Sitaan	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Ket
						0.5% (lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)		
TIDAK ADA											
Total						-		-	-		

KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 30 JUNI 2025

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	URAIAN	NILAI SSBP	JANGKA WAKTU (Bulan)	TMT	JATUH TEMPO	DALUWARSA		PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						S.d. 30 JUNI 2025	TAHUN BERJALAN 2025	
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR
PER 30 JUNI 2025

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 30 Juni 2025	Sisa TP/ TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Ket
							0.5% (lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Total							-		-	-		

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

DAFTAR REKAPITULASI PENJELASAN SALDO NERACA AKRUAL PER 30 JUNI 2025

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	KODE AKUN	URAIAN	PENJELASAN
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP	Uang Muka dari KPPN senilai Rp20.000.000 untuk Uang Persediaan
2	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar;	Gaji Pegawai Bulan Juli 2024 Rp280.933.571
3	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar;	Honor PPNPB Bulan Juni 2024 Rp53.595.000

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris

Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 30 JUNI 2025**

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (0100) DKI Jakarta
Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	69.927.860	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751509000560 /SPM NO: 00118T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
2	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.059	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751509000560 /SPM NO: 00118T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
3	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	4.554.656	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751509000560 /SPM NO: 00118T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
4	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1.372.909	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751509000560 /SPM NO: 00118T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
5	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	7.390.000	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751501001159 /SPM NO: 00117T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS dan Tunj. Struktural Bulan Juli 2025
6	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	480.000	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
7	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	204.517	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751509000560 /SPM NO: 00118T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
8	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.983.100	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751509000560 /SPM NO: 00118T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
9	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2.945.000	SP2D NO: 251751501001196 /SPM NO: 00127T TANGGAL 12-06-2025 SP2D NO: 251751509000560 /SPM NO: 00118T TANGGAL 10-06-2025	Gaji PNS Bulan Juli 2025
10	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI	5.170.000	SP2D NO: 251751501001160 /SPM NO: 00116T TANGGAL 10-06-2025	Tunj. Panitera Bulan Juli 2025
11	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511225	Belanja PPh Tunjangan fungsional TNI	181.341	SP2D NO: 251751501001160 /SPM NO: 00116T TANGGAL 10-06-2025	Tunj. Panitera Bulan Juli 2025
12	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	29.049.157	SP2D NO: 251751501001161 /SPM NO: 00119T TANGGAL 11-06-2025	Tunj. Pejanat Negara Bulan Juli

13	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	143.900.000	SP2D NO: 251751501001161 /SPM NO: 00119T TANGGAL 11-06-2025	Tunj. Pejabat Negara Bulan Juli 2025
14	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.610.800	SP2D NO: 251751501001162 /SPM NO: 00120T TANGGAL 11-06-2025	Gaji PPPK Bulan Juli 2025
15	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	132	SP2D NO: 251751501001162 /SPM NO: 00120T TANGGAL 11-06-2025	Gaji PPPK Bulan Juli 2025
16	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	320.360	SP2D NO: 251751501001162 /SPM NO: 00120T TANGGAL 11-06-2025	Gaji PPPK Bulan Juli 2025
17	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511624	BelanjaTunjangan Fungsional PPPK	1.553.000	SP2D NO: 251751501001162 /SPM NO: 00120T TANGGAL 11-06-2025	Gaji PPPK Bulan Juli 2025
18	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680	SP2D NO: 251751501001162 /SPM NO: 00120T TANGGAL 11-06-2025	Gaji PPPK Bulan Juli 2025
19	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2025	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Honor PPNP)	53.595.000	SP2D NO: 259991530010094 /SPM NO: 00130T TANGGAL 24-06-2025	Honor PPNP Bulan Juni 2025
TOTAL								334.528.571		

Jakarta, 24 Juli 2025

Sekretaris

Nuratihah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEMESTER I TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (663161) Pengadilan Militer Utama
Kode dan Nama UAPPAW : (401112) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Seharusnya
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Seharusnya
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Seharusnya
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Seharusnya
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		Seharusnya
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	Tidak
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		Ya
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak

10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DIP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	✓		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	✓		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	✓		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2025 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak

7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAHAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya/Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAHAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan

Mengetahui
Pejabat Penyusun,

Dwi Mulyanto, S.E., M.M.
NIP. 198109202006041007

Jakarta, 24 Juli 2025
Penelaah

Try Susanti, S.E.
NIP.199506062020122005

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 2:59 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,048	6,626,541,784	11	71,600,000	0	0	1,059	6,698,141,784
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	5	1,292,921,612	0	0	0	0	5	1,292,921,612
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	2	319,249,000	0	0	0	0	2	319,249,000
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	103,697,000	0	0	0	0	6	103,697,000
3020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	1	1,200,000	0	0	0	0	1	1,200,000
3040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	-	5	45,963,764	0	0	0	0	5	45,963,764
3050101	MESIN KETIK	-	2	4,119,500	0	0	0	0	2	4,119,500
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGAANDAN)	-	2	148,900,000	0	0	0	0	2	148,900,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	98	413,793,646	0	0	0	0	98	413,793,646
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	46	117,232,056	0	0	0	0	46	117,232,056
3050199	ALAT KANTOR LAINNYA	-	13	8,776,000	0	0	0	0	13	8,776,000
3050201	MEUBELAIR	-	453	1,399,017,058	0	0	0	0	453	1,399,017,058
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	-	25	4,125,000	0	0	0	0	25	4,125,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	4	5,885,000	0	0	0	0	4	5,885,000
3050204	ALAT PENDINGIN	-	60	321,081,380	10	70,900,000	0	0	70	391,981,380
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	130	284,774,998	0	0	0	0	130	284,774,998
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	22	110,305,500	0	0	0	0	22	110,305,500
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	15	145,437,944	0	0	0	0	15	145,437,944
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	-	3	89,885,322	0	0	0	0	3	89,885,322
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	9	46,679,000	0	0	0	0	9	46,679,000
3060207	ALAT-ALAT SANDI	-	2	13,950,000	0	0	0	0	2	13,950,000
3060209	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	-	1	14,652,000	0	0	0	0	1	14,652,000
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	-	2	12,720,000	0	0	0	0	2	12,720,000
3060347	SUMBER TENAGA	-	1	316,380,000	0	0	0	0	1	316,380,000
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	77	1,042,409,670	0	0	0	0	77	1,042,409,670
3100201	PERALATAN MAINFRAME	-	5	36,500,000	0	0	0	0	5	36,500,000
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	54	183,151,334	1	700,000	0	0	55	183,851,334
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	4	138,235,000	0	0	0	0	4	138,235,000
133111	Gedung dan Bangunan		1	5,806,817,600	1	5,806,817,600	1	5,806,817,600	1	5,806,817,600
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	1	5,806,817,600	0	0	1	5,806,817,600	0	0
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	-	0	0	1	5,806,817,600	0	0	1	5,806,817,600
135121	Aset Tetap Lainnya		3	6,940,000	0	0	0	0	3	6,940,000
6010101	BUKU	-	3	6,940,000	0	0	0	0	3	6,940,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 23/07/25 2:59 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_satker_poc

Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_saker_pu

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				37,674,641,384		31,112,759,600		31,041,159,600		37,746,241,384

Jakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 663161 **PENGADILAN MILITER UTAMA**

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM

Tanggal : 24/07/25 12:11 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2025
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

Jakarta, 24 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Nuratiah
Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 663161 **PENGADILAN MILITER UTAMA**

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM

Tanggal : 24/07/25 12:11 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta, 24 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 23/07/25 3:07 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		131	34,445,452	1	700,000	0	0	132	35,145,452
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	5	3,639,900	0	0	0	0	5	3,639,900
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	2	1,450,000	0	0	0	0	2	1,450,000
3050199	ALAT KANTOR LAINNYA	-	11	3,926,000	0	0	0	0	11	3,926,000
3050201	MEUBELAIR	-	30	8,880,000	0	0	0	0	30	8,880,000
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	-	25	4,125,000	0	0	0	0	25	4,125,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	56	11,865,476	0	0	0	0	56	11,865,476
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	2	559,076	0	0	0	0	2	559,076
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	0	0	1	700,000	0	0	1	700,000
TOTAL				34,445,452		700,000		0		35,145,452

Jakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 23/07/25 12:26 PM

Tanggal : 23/07/25 3:06 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000
132111	Peralatan dan Mesin		917	6,592,096,332	10	70,900,000	0	0	927	6,662,996,332
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	5	1,292,921,612	0	0	0	0	5	1,292,921,612
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	2	319,249,000	0	0	0	0	2	319,249,000
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	103,697,000	0	0	0	0	6	103,697,000
3020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	1	1,200,000	0	0	0	0	1	1,200,000
3040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	-	5	45,963,764	0	0	0	0	5	45,963,764
3050101	MESIN KETIK	-	2	4,119,500	0	0	0	0	2	4,119,500
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAN)	-	2	148,900,000	0	0	0	0	2	148,900,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	93	410,153,746	0	0	0	0	93	410,153,746
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	44	115,782,056	0	0	0	0	44	115,782,056
3050199	ALAT KANTOR LAINNYA	-	2	4,850,000	0	0	0	0	2	4,850,000
3050201	MEUBELAIR	-	423	1,390,137,058	0	0	0	0	423	1,390,137,058
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	4	5,885,000	0	0	0	0	4	5,885,000
3050204	ALAT PENDINGIN	-	60	321,081,380	10	70,900,000	0	0	70	391,981,380
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	74	272,909,522	0	0	0	0	74	272,909,522
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	22	110,305,500	0	0	0	0	22	110,305,500
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	13	144,878,868	0	0	0	0	13	144,878,868
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	-	3	89,885,322	0	0	0	0	3	89,885,322
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	9	46,679,000	0	0	0	0	9	46,679,000
3060207	ALAT-ALAT SANDI	-	2	13,950,000	0	0	0	0	2	13,950,000
3060209	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	-	1	14,652,000	0	0	0	0	1	14,652,000
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	-	2	12,720,000	0	0	0	0	2	12,720,000
3060347	SUMBER TENAGA	-	1	316,380,000	0	0	0	0	1	316,380,000
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	77	1,042,409,670	0	0	0	0	77	1,042,409,670
3100201	PERALATAN MAINFRAME	-	5	36,500,000	0	0	0	0	5	36,500,000
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	54	183,151,334	0	0	0	0	54	183,151,334
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	4	138,235,000	0	0	0	0	4	138,235,000
133111	Gedung dan Bangunan		1	5,806,817,600	1	5,806,817,600	1	5,806,817,600	1	5,806,817,600
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	1	5,806,817,600	0	0	1	5,806,817,600	0	0
4010124	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	-	0	0	1	5,806,817,600	0	0	1	5,806,817,600
135121	Aset Tetap Lainnya		3	6,940,000	0	0	0	0	3	6,940,000
6010101	BUKU	-	3	6,940,000	0	0	0	0	3	6,940,000
TOTAL				37,640,195,932		31,112,059,600		31,041,159,600		37,711,095,932



Jakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nurati

Nuratih, S.H., M.H.
197109051998032005

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
131111 Tanah

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 1 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	M2	(3,000)	(25,234,342,000)	(3,000)	(25,234,342,000)	0	0
2010104026	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan		3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	M2	3,000	25,234,342,000	3,000	25,234,342,000	0	0
TOTAL				25,234,342,000		25,234,342,000		0

Jakarta, 24 July 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 2 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020101001	Sedan		4	981,321,612	4	981,321,612	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	981,321,612	4	981,321,612	0	0
3020101003	Station Wagon		1	311,600,000	1	311,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	311,600,000	1	311,600,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		2	319,249,000	2	319,249,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	319,249,000	2	319,249,000	0	0
3020104001	Sepeda Motor		6	103,697,000	6	103,697,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	6	103,697,000	6	103,697,000	0	0
3020201002	Gerobak Dorong		1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
3020202003	Kursi Roda		1	1,200,000	1	1,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	1,200,000	1	1,200,000	0	0
3040104004	Lemari Penyimpan		5	45,963,764	5	45,963,764	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	45,963,764	5	45,963,764	0	0
3050101004	Mesin Ketik Listrik		2	4,119,500	2	4,119,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	4,119,500	2	4,119,500	0	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio		2	148,900,000	2	148,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	148,900,000	2	148,900,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		33	83,180,000	30	80,540,000	3	2,640,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	33	83,180,000	30	80,540,000	3	2,640,000
3050104002	Lemari Kayu		12	143,796,332	12	143,796,332	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	143,796,332	12	143,796,332	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 3 dari 12
Kode Lap : lap_crbtn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050104003	Rak Besi		4	12,940,700	2	11,940,800	2	999,900
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	12,940,700	2	11,940,800	2	999,900
3050104004	Rak Kayu		5	16,657,520	5	16,657,520	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	16,657,520	5	16,657,520	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		20	37,325,500	20	37,325,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	37,325,500	20	37,325,500	0	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu		18	27,573,480	18	27,573,480	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	27,573,480	18	27,573,480	0	0
3050104007	Brandkas		2	24,107,169	2	24,107,169	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	24,107,169	2	24,107,169	0	0
3050104014	Mobile File		2	60,442,000	2	60,442,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	60,442,000	2	60,442,000	0	0
3050104020	Lemari Display		1	5,940,000	1	5,940,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,940,000	1	5,940,000	0	0
3050104029	Box Camera		1	1,830,945	1	1,830,945	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	1,830,945	1	1,830,945	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api		5	12,105,000	5	12,105,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	12,105,000	5	12,105,000	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		32	75,094,056	32	75,094,056	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	32	75,094,056	32	75,094,056	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		3	5,095,000	2	4,145,000	1	950,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	5,095,000	2	4,145,000	1	950,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 4 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105024	Alat Pemotong Kertas		1	5,169,000	1	5,169,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,169,000	1	5,169,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		2	13,280,000	2	13,280,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	13,280,000	2	13,280,000	0	0
3050105056	Panic Button System, Alarm Indicator		1	500,000	0	0	1	500,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	500,000	0	0	1	500,000
3050105081	Papan Pengumuman		2	5,989,000	2	5,989,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	5,989,000	2	5,989,000	0	0
3050199999	Alat Kantor Lainnya		13	8,776,000	2	4,850,000	11	3,926,000
000	Saldo Awal TAYL	dummy	13	8,776,000	2	4,850,000	11	3,926,000
3050201002	Meja Kerja Kayu		72	564,277,446	70	562,547,446	2	1,730,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	72	564,277,446	70	562,547,446	2	1,730,000
3050201003	Kursi Besi/Metal		194	137,663,300	176	131,938,300	18	5,725,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	194	137,663,300	176	131,938,300	18	5,725,000
3050201004	Kursi Kayu		11	35,940,300	11	35,940,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	35,940,300	11	35,940,300	0	0
3050201005	Sice		31	77,277,000	31	77,277,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	31	77,277,000	31	77,277,000	0	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu		6	12,533,400	6	12,533,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	12,533,400	6	12,533,400	0	0
3050201008	Meja Rapat		4	50,974,143	4	50,974,143	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	50,974,143	4	50,974,143	0	0
3050201009	Meja Komputer		36	43,748,600	26	42,323,600	10	1,425,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 5 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	36	43,748,600	26	42,323,600	10	1,425,000
3050201010	Tempat Tidur Besi		19	41,465,000	19	41,465,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	41,465,000	19	41,465,000	0	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu		2	6,963,000	2	6,963,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,963,000	2	6,963,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis		2	24,155,842	2	24,155,842	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	24,155,842	2	24,155,842	0	0
3050201019	Meja Makan Kayu		1	5,170,000	1	5,170,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,170,000	1	5,170,000	0	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		41	41,245,600	41	41,245,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	41	41,245,600	41	41,245,600	0	0
3050201025	Gantungan Jas		2	974,600	2	974,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	974,600	2	974,600	0	0
3050201033	Sofa		2	9,400,000	2	9,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	set	2	9,400,000	2	9,400,000	0	0
3050201999	Meubelair Lainnya		30	347,228,827	30	347,228,827	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	30	347,228,827	30	347,228,827	0	0
3050202003	Jam Elektronik		25	4,125,000	0	0	25	4,125,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	25	4,125,000	0	0	25	4,125,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya		4	5,885,000	4	5,885,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	5,885,000	4	5,885,000	0	0
3050204001	Lemari Es		6	30,954,180	6	30,954,180	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	30,954,180	6	30,954,180	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 6 dari 12
Kode Lap : lap_crbrmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050204004	A.C. Split		64	361,027,200	64	361,027,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	54	290,127,200	54	290,127,200	0	0
101	Pembelian	Buah	10	70,900,000	10	70,900,000	0	0
3050206002	Televisi		11	83,231,000	11	83,231,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	83,231,000	11	83,231,000	0	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))		1	10,947,500	1	10,947,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	10,947,500	1	10,947,500	0	0
3050206007	Loudspeaker		8	18,400,000	8	18,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	18,400,000	8	18,400,000	0	0
3050206008	Sound System		3	44,030,800	3	44,030,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	44,030,800	3	44,030,800	0	0
3050206013	Megaphone		1	4,000,000	1	4,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,000,000	1	4,000,000	0	0
3050206014	Microphone		11	13,750,000	11	13,750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	13,750,000	11	13,750,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply		1	1,387,500	1	1,387,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,387,500	1	1,387,500	0	0
3050206020	Camera Video		1	6,996,666	1	6,996,666	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	6,996,666	1	6,996,666	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila		3	1,983,300	3	1,983,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,983,300	3	1,983,300	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden		3	1,293,600	3	1,293,600	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 7 dari 12
Kode Lap : lap_crbrmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,293,600	3	1,293,600	0	0
3050206030	Tiang Bendera		8	18,623,000	8	18,623,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	18,623,000	8	18,623,000	0	0
3050206033	Water Filter		1	4,475,828	1	4,475,828	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,475,828	1	4,475,828	0	0
3050206034	Tangga Aluminium		1	5,317,000	1	5,317,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,317,000	1	5,317,000	0	0
3050206036	Dispenser		18	38,322,500	18	38,322,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	38,322,500	18	38,322,500	0	0
3050206037	Mimbar/Podium		1	3,300,000	1	3,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,300,000	1	3,300,000	0	0
3050206042	Lambang Instansi		1	4,475,828	1	4,475,828	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,475,828	1	4,475,828	0	0
3050206057	Vertikal Blind		54	11,394,676	0	0	54	11,394,676
000	Saldo Awal TAYL	Buah	54	11,394,676	0	0	54	11,394,676
3050206078	Bingkai Foto		1	12,375,000	1	12,375,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	12,375,000	1	12,375,000	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan		2	470,800	0	0	2	470,800
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	470,800	0	0	2	470,800
3060101002	Audio Mixing Portable		2	1,980,000	2	1,980,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,980,000	2	1,980,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC		12	12,000,000	12	12,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	12,000,000	12	12,000,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 8 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		7	55,125,000	7	55,125,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	55,125,000	7	55,125,000	0	0
3060101060	Power Amplifier		1	41,200,500	1	41,200,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	41,200,500	1	41,200,500	0	0
3060102042	Rak Peralatan		3	1,515,616	3	1,515,616	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,515,616	3	1,515,616	0	0
3060102057	Slide Projector		1	29,978,500	1	29,978,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	29,978,500	1	29,978,500	0	0
3060102061	Lensa Kamera		2	559,076	0	0	2	559,076
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	559,076	0	0	2	559,076
3060102128	Camera Digital		2	42,628,500	2	42,628,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	42,628,500	2	42,628,500	0	0
3060102135	LCD Monitor		5	17,441,252	5	17,441,252	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	17,441,252	5	17,441,252	0	0
3060102151	Splitter		1	1,815,000	1	1,815,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,815,000	1	1,815,000	0	0
3060102165	Camera Conference		1	51,500,000	1	51,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	51,500,000	1	51,500,000	0	0
3060105010	Contact Printer		3	89,885,322	3	89,885,322	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	89,885,322	3	89,885,322	0	0
3060201001	Telephone (PABX)		1	21,230,000	1	21,230,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	21,230,000	1	21,230,000	0	0
3060201010	Facsimile		8	25,449,000	8	25,449,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 9 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	25,449,000	8	25,449,000	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System		2	13,950,000	2	13,950,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	13,950,000	2	13,950,000	0	0
3060209007	Digital Recording System		1	14,652,000	1	14,652,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	14,652,000	1	14,652,000	0	0
3060323015	Switcher/Patch Panel		2	12,720,000	2	12,720,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	12,720,000	2	12,720,000	0	0
3060347002	Genset		1	316,380,000	1	316,380,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	316,380,000	1	316,380,000	0	0
3100102001	P.C Unit		44	576,087,004	44	576,087,004	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	44	576,087,004	44	576,087,004	0	0
3100102002	Lap Top		33	466,322,666	33	466,322,666	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	33	466,322,666	33	466,322,666	0	0
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)		5	36,500,000	5	36,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	36,500,000	5	36,500,000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		48	125,523,430	47	124,823,430	1	700,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	47	124,823,430	47	124,823,430	0	0
101	Pembelian	Buah	1	700,000	0	0	1	700,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		7	58,327,904	7	58,327,904	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	58,327,904	7	58,327,904	0	0
3100204001	Server		2	124,630,000	2	124,630,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	124,630,000	2	124,630,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 10 dari 12
Kode Lap : lap_crbrmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100204002	Router		1	6,100,000	1	6,100,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	6,100,000	1	6,100,000	0	0
3100204014	Rak Server		1	7,505,000	1	7,505,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,505,000	1	7,505,000	0	0
TOTAL				6,698,141,784		6,662,996,332		35,145,452

Jakarta, 24 July 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 11 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	5,806,817,600	1	5,806,817,600	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	Unit	(1)	(5,806,817,600)	(1)	(5,806,817,600)	0	0
4010124002	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding		1	5,806,817,600	1	5,806,817,600	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	UNIT	1	5,806,817,600	1	5,806,817,600	0	0
TOTAL				5,806,817,600		5,806,817,600		0

Jakarta, 24 July 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nurafiah, S.H., M.H.
197109051998032005

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 24/07/2025 12.13.58
Halaman : 12 dari 12
Kode Lap : lap_crblmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010101001	Monografi		3	6,940,000	3	6,940,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	6,940,000	3	6,940,000	0	0
TOTAL				6,940,000		6,940,000		0

Jakarta, 24 July 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tanggal : 24/07/25 12:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	190,000
1010301006	Ordner Dan Map	1,284,000
1010301010	Alat Perekat	120,000
1010302001	Kertas HVS	865,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,540,000
1010304006	USB/Flash Disk	975,000
1010309001	Meterai	240,000
Jumlah Barang Konsumsi		6,214,000
TOTAL		6,214,000

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl.Data : 23/07/25 6:27 AM
Tgl.Cetak : 23/07/25 8:40 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	6,214,000
131111	Tanah	25,234,342,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,662,996,332
133111	Gedung dan Bangunan	5,806,817,600
135121	Aset Tetap Lainnya	6,940,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,297,807,579)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,077,169,240)
J U M L A H		30,342,333,113

Jakarta, 23 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, www.dilmiltama.go.id, admin@dilmiltama.go.id

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : 731 /SEK.PMU/PL1.2/VII/2025

Nama Satker : Pengadilan Militer Utama
Kode Satker : 005.01.0100.663161
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung

Pada hari ini, Jumat Tanggal 4 Bulan Juli Tahun 2025, bertempat di Pengadilan Militer Utama, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Thomas Willem Richard Imbiri, S.E., S.H.
NRP : 21930118770373
Jabatan : **Ketua**
2. Nama : Try Susanti, S.E.
NRP : 199506062020122005
Jabatan : **Sekretaris**
3. Nama : Herdian Syahfrudin, A.Md.T.
NIP : 199412292019031006
Jabatan : **Anggota**

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semesteran Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Thomas W. R. Imbiri, S.E., S.H.
2. Try Susanti, S.E.
3. Herdian Syahfrudin, A.Md.T.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Militer Utama
Kode Satker : 005.01.0100.663161
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung

No	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi Barang		
				Saldo SAKTI	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	Baliner Pilot Hitam	000052	Pak	1	1	0	✓		
2	Pulpen Squezy 805	000055	Pak	2	2	0	✓		
3	Odner Bandex	000012	Pcs	8	8	0	✓		
4	Box File 1034B	000030	Pcs	3	3	0	✓		
5	Map Kabita Dus	000033	Dus	1	1	0	✓		
6	Business File (pak)	000038	Pak	1	1	0	✓		
7	Map Kancing Bening	000040	Pak	12	12	0	✓		
8	Box File Lipat Jenia	000049	Pcs	28	28	0	✓		
9	Lakban Hitam Daimaru	000029	Pcs	8	8	0	✓		
10	A4 BMO	000027	Rim	5	5	0	✓		
11	F4 BMO	000028	Rim	15	15	0	✓		
12	tinta hitam 664	000007	Botol	3	3	0	✓		
13	tinta warna merah	000008	Botol	3	3	0	✓		
14	tinta printer biru 664	000009	Botol	3	3	0	✓		
15	Tinta printer kuning 664	000010	Botol	3	3	0	✓		
16	TONER 85A	000019	Pcs	3	3	0	✓		
17	TONER 12 A	000020	Pcs	3	3	0	✓		
18	Tinta Canon 790 Hitam	000021	Botol	2	2	0	✓		
19	Tinta Canon 790 Merah	000022	Botol	2	2	0	✓		
20	Tinta Canon 790 Biru	000023	Botol	2	2	0	✓		
21	Tinta Canon 790 Kuning	000024	Botol	2	2	0	✓		
22	FlasdiH Disk	000001	Buah	15	15	0	✓		
23	Materai	000001	Pcs	20	20	0	✓		

Tim Pelaksana Opname Fisik

1.
2.
3.

PENGADILAN MILITER UTAMA

Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer Utama

Nurrahman, S.H., M.H.

NIP 197109051998032005



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 49/SEK/SK.PL1.2/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat permohonan penetapan pelaksanaan sewa pada Pengadilan Militer Utama sebagaimana surat Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 1043/KPMU/PL1.2.1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 hal Permohonan Pendelegasian Wewenang Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Pengadilan Militer Utama;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan pelaksanaan sewa terhadap Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

5. Keputusan...

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1681/SEK/SK.PL1.2/XII/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara (Non Rumah Negara) Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa Barang Milik Negara Non Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGADILAN MILITER UTAMA.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama untuk disewakan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Perjanjian sewa ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan Penyewa, bersamaan dengan tanggal bayar pada Bukti Penerimaan Negara (BPN).

KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.

KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa untuk periodesitas tahunan.

KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Perlengkapan dan Menteri Keuangan R.I., c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 12 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Kepala Pengadilan Militer Utama;
2. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I;
4. Sekretaris Pengadilan Militer Utama untuk dilaksanakan/ dilaporkan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 49/SEK/SK.PL1.2/1/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	PENYEWA	LUAS YANG DISEWAKAN (M²)	JANGKA WAKTU	PERIODESITAS	NILAI SEWA (RP)	PERUNTUKAN SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Raya Penggilingan, RT.5/RW.3, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6	2 (dua) tahun	per tahun	25.251.000	Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Nilai Sewa senilai Rp25.251.000,00 per tahun, tidak termasuk biaya listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Biaya listrik ditanggung sendiri oleh penyewa, sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Militer Utama Nomor 1189/SEKPMU/B/PL1.2.1/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023
JUMLAH									25.251.000		

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO



Nomor : S-1/MK.6/KNL.0701/2024 2 Januari 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesias
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 478/SEK/PL1.2/XI/2023 tanggal 17 November 2023 hal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah pada Pengadilan Militer Utama, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama berupa sebagian tanah seluas 6m² yang terletak di Jalan Raya Penggilingan, RT.5/ RW.3, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, dengan total nilai perolehan BMN secara proporsional sebesar Rp50.468.684,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun dengan nilai sewa total Rp50.502.000,00 (lima puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) atau nilai sewa per tahun sebagaimana rincian terlampir.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan perjanjian sewa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I), yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening kas umum negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.



2

5. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Pengadilan Militer Utama;
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN; dan
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.





Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-1/MK.6/KNL.0701/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN**

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Penyewa	Luas yang Disewakan (m ²)	Jangka Waktu	Periodesitas	Nilai Sewa (Rp)	Peruntukan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Raya Penggilingan, RT.5/ RW.3, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6	2 (dua) tahun	per tahun	25.251.000,00	Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ATM
a n t a r a
PENGADILAN MILITER UTAMA
dengan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA

Nomor Pengadilan Militer Utama : 06/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024
Nomor : B. 356 /KC-V/LOG/01/2024, tanggal 02 Januari 2024

Perjanjian ini dibuat pada Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nuratiah, S.H., M.H.**, jabatan Sekretaris Pengadilan Militer Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, oleh karena itu mewakili Pengadilan Militer Utama, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Iwan Supriyanto**, Pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Jakarta Jatinegara, berkantor di Jalan Jatinegara Timur No. 44 B Jakarta Timur 13310, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang mewakili Direksi berdasarkan surat Kuasa Direksi Akta No. 07 tanggal 21-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 1 Tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga), bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik hak atas sebidang tanah.
2. **PIHAK KEDUA** untuk memudahkan pelayanan perbankan kepada anggota Pengadilan Militer Utama, memerlukan ruangan untuk ATM di lokasi tersebut diatas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Sewa-menyewa dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PERJANJIAN

Untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kegunaan serta nilai tambah dari tanah Pengadilan Militer, maka **PIHAK PERTAMA** menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyewa dari **PIHAK PERTAMA** sebidang tanah Pengadilan Militer Utama tersebut di atas.

PIHAK I :
PIHAK II : 

Pasal 2
OBJEK DAN PERUNTUKAN


- (1) Obyek sewa menyewa tersebut pada pasal 1 di atas :
- | | |
|--------------------|--|
| Letak | : Pengadilan Militer Utama
Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur |
| Luas Tanah | : $\pm 2,1 \text{ m}^2 \times 2,5 \text{ m}^2$ |
| Status Kepemilikan | : Milik Pengadilan Militer Utama |
- (2) Peruntukan obyek sewa menyewa tersebut digunakan untuk dibangun ruangan ATM BRI.

Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA

- (1) Jangka waktu sewa menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung efektif mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) yang dibayarkan per tahun paling lambat tanggal 31 Januari.
- (2) Jangka waktu sewa menyewa dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan untuk perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Militer Utama berupa penempatan ATM BRI yang berlokasi di Komplek Pengadilan Militer Utama, Jl. Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 50.502.000,- (lima puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.
- (4) Jika ada perubahan ketentuan besarnya sewa menyewa termasuk di dalamnya pemasukan kepada Kas Negara yang berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PARA PIHAK akan melakukan kesepakatan kembali.

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan :
- Pembayaran sewa tersebut dilakukan pertahun dengan nominal sebesar Rp. 25.251.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - Semua pembayaran atas tanah yang disewakan dapat dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme setoran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan Mata Anggaran Penerimaan PNBPN 425131 (Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan) melalui Bendahara Pengadilan Militer Utama.

PIHAK I :
PIHAK II : 


Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

- a. Menerima pembayaran sewa dari **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi *Digit* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Utama.
- b. Menerima kembali obyek sewa menyewa setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir.
- c. Memberikan jaminan ketentraman dan keselamatan atas penggunaan tanah yang menjadi obyek sewa menyewa selama berlangsungnya sewa menyewa.
- d. Menyediakan tempat untuk pemasangan antena parabola V-Sat.
- e. Menyediakan tempat pemasangan Neon Sign dan Pylon yang mana melekat pada ATM Bank Rakyat Indonesia.
- f. Mendukung kelancaran pemeriksaan berkala dan perbaikan ATM BRI oleh teknisi dari **PIHAK KEDUA**.
- g. Mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian kembali uang tunai kedalam ATM oleh **PIHAK KEDUA**.
- h. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** atau teknisi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan service/pemeliharaan dan perbaikan atas ATM BRI.
- i. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perbaikan berkala (kalau diperlukan) secara teratur pada semua fasilitas yang ada, agar fasilitas tersebut dapat bekerja dengan baik.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Menggunakan tanah yang dijadikan obyek sewa menyewa sesuai dengan kebutuhan dan keperluan **PIHAK KEDUA** atas beban dan tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Membangun ruangan ATM BRI yang dijadikan obyek sewa menyewa sesuai dengan kebutuhan dan keperluan **PIHAK KEDUA** atas beban dan tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- c. Mengoperasikan ATM BRI mulai hari Senin sampai dengan Minggu termasuk hari libur selama 24 jam sehari.
- d. Mengasuransikan sendiri semua barang milik **PIHAK KEDUA** yang berada di dalam ruangan ATM BRI, termasuk dana di dalam ATM BRI dan barang-barang lainnya milik **PIHAK KEDUA** yang berada di lokasi **PIHAK PERTAMA** terhadap bahaya kebakaran, kehilangan/kerusakan oleh sebab apapun juga atas tanggungan biaya **PIHAK KEDUA**.
- e. Membayar uang sewa sesuai dengan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 3 di atas.
- f. Memelihara ATM BRI sehingga dapat beroperasi dengan baik.
- g. Memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** jadwal pemeriksaan berkala ATM BRI oleh teknisi dari **PIHAK KEDUA**.
- h. Memberitahukan **PIHAK PERTAMA** jika ada rencana penghentian sementara operasional ATM BRI.
- i. Melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang bermaksud tidak baik dan meningkatkan keamanan ATM BRI baik secara fisik maupun non fisik (dari segi perangkat lunak).
- j. Memelihara sebaik-baiknya dan wajib memperbaiki dengan segera kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena kesalahan/kerusakan mesin/peralatan **PIHAK KEDUA**.
- k. Membayar biaya pemakaian listrik setiap bulannya langsung kepada Perusahaan Listrik Negara sehubungan dengan beroperasinya ATM BRI dimaksud yang seluruhnya biaya pemasangan, meteran listrik tersebut dibayar dan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I :
PIHAK II :

- l. Mengadakan sendiri antena Parabola V-Sat atas nama PIHAK KEDUA untuk mengoperasikan ATM BRI dengan biaya pengadaan antena Parabola V-Sat atas tanggungan dan beban **PIHAK KEDUA**.
- m. Menanggung biaya pemasangan Neon Sign Pylon yang melekat pada ATM BRI.
- n. Menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat ATM BRI dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN


- (1) Perjanjian sewa menyewa ini berakhir karena jangka waktu sewa menyewa setelah habis masa berlakunya atau
 - a. Karena ada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian, atau
 - b. Karena salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 di atas.
- (2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh para pihak sampai saat perjanjian ini berakhir, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak tersebut wajib dipenuhi/diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perjanjian ini berakhir.

Pasal 7 JAMINAN

- (1) PARA PIHAK masing-masing menyatakan dan menjamin terhadap satu dengan yang lain bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah benar-benar pihak-pihak yang secara sah berwenang untuk bertindak mewakili dari pihak yang diwakilinya sesuai dengan dan atau seluruh ketentuan hukum termasuk telah dipenuhinya prosedur internal yang ada dan berlaku sebagaimana mestinya pada masing-masing.
- (2) Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa :
 - a. Tanah yang dijadikan obyek sewa menyewa tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang disewakan atau dijaminkan atau belum pernah dialihkan hak kepemilikan dan atau penggunaannya kepada **PIHAK KETIGA**.
 - b. Sebelumnya tidak pernah ada kerjasama atau kesepakatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KETIGA** lainnya dalam bentuk dan cara apapun juga menyangkut tanah yang dijadikan obyek sewa menyewa, kecuali perjanjian sewa menyewa yang hanya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menjamin satu terhadap yang lain melaksanakan seluruh isi kesepakatan dalam perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat membayar uang sewa kepada **PIHAK PERTAMA** selama 30 (tiga puluh) hari setelah surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda karena keterlambatannya sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan.

PIHAK I :
PIHAK II : 

Pembayaran denda tersebut tidak menghapuskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan pembayaran sewa yang diperjanjikan.

- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ternyata **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan kembali obyek sewa menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** maka cukup dibuktikan dengan telah dilewatkannya waktu saja tanpa diperlukan teguran atau pemberitaan apapun atas keterlambatan tersebut **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda keterlambatan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung efektif mulai hari kelimabelas yang harus dibayar seketika dan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 FORCE MAJEURE


- (1) Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, peperangan, epidemi dan kebakaran yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal ini force majeure , maka PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis serta memberikan bukti-bukti kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa force majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure tersebut.
- (3) Apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing – masing pihak satu dengan lainnya.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 di atas, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku dan berdaya guna paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini .
- (2) Hal-hal yang tidak diatur atau sekiranya belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan dan diputuskan oleh dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK secara bersama-sama. Perjanjian ini tidak berakhir karena dibubarkannya para pihak. Dalam hal tersebut para pengganti hak, masing-masing pihak wajib mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini.

PIHAK I :
PIHAK II : 

- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan, mensub-kontrakan Perjanjian ini atau setiap hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (4) Bila terjadi perselisihan paham antar kedua belah pihak, harus diputuskan/direalisasikan secara tertulis oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah.
- (5) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.
- (6) Terhadap Perjanjian ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (7) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat yang berhubungan dengan Perjanjian ini dialamatkan kepada ;

PIHAK PERTAMA : PENGADILAN MILITER UTAMA
Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur

PIHAK KEDUA : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Jatinegara
Jalan Jatinegara Timur Nomor 44B
Jakarta Timur 13310
Telepon (021) 8506400
Facsimile (021) 8500646

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak diatas meterai yang cukup pada hari dan tanggal sebagai mana tercantum diawal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN MILITER UTAMA
Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda NIP. 197109051998032005


PIHAK KEDUA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA



Iwan Supriyanto

Pemimpin Cabang

PIHAK I :
PIHAK II : 

ADDENDUM
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ATM
antara
PENGADILAN MILITER UTAMA
dengan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA

Nomor Pengadilan Militer Utama : 245/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 27 Februari 2024
Nomor : B. 625/KC-V/LOG/01/2024, tanggal 27 Februari 2024

ATAS
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ATM

Nomor Pengadilan Militer Utama : 06/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024
Nomor : B. 3621/KC-V/LOG/01/2024, tanggal 02 Januari 2024

Addendum perjanjian ini dibuat pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nuratiah, S.H., M.H.**, jabatan Sekretaris Pengadilan Militer Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, oleh karena itu mewakili Pengadilan Militer Utama, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Iwan Supriyanto**, Pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Jakarta Jatinegara, berkantor di Jalan Jatinegara Timur No. 44 B Jakarta Timur 13310, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang mewakili Direksi berdasarkan surat Kuasa Direksi Akta No. 07 tanggal 21-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 1 Tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga), bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum sewa menyewa yang dicantumkan dalam Perjanjian Sewa Nomor : 06/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024 dan B. 3621/KC-V/LOG/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 dengan obyek sebagai berikut :

Obyek sewa	: Sebidang Tanah
Letak	: Pengadilan Militer Utama Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur
Luas Tanah	: $\pm 2,1 \text{ m}^2 \times 2,5 \text{ m}^2$
Status Kepemilikan	: Milik Pengadilan Militer Utama

PIHAK I :

PIHAK II :

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum terhadap perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuannya sebagai berikut :

2. Melakukan perubahan Pasal 3 tentang Jangka Waktu dan Harga Sewa yang semula sebagai berikut :


Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA

- (1) Jangka waktu sewa menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung efektif mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) yang dibayarkan per tahun paling lambat tanggal 31 Januari.
- (2) Jangka waktu sewa menyewa dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan untuk perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Militer Utama berupa penempatan ATM BRI yang berlokasi di Komplek Pengadilan Militer Utama, Jl. Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 50.502.000,- (lima puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.
- (4) Jika ada perubahan ketentuan besarnya sewa menyewa termasuk di dalamnya pemasukan kepada Kas Negara yang berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PARA PIHAK akan melakukan kesepakatan kembali.

Berubah Menjadi :

Pasal 3
JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA

- (1) Jangka waktu sewa menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung efektif mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) yang dibayarkan per tahun paling lambat tanggal 2 Januari.
- (2) Jangka waktu sewa menyewa dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan untuk perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Militer

PIHAK I :
PIHAK II :

Utama berupa penempatan ATM BRI yang berlokasi di Komplek Pengadilan Militer Utama, Jl. Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 50.502.000,- (lima puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.

- (4) Jika ada perubahan ketentuan besarnya sewa menyewa termasuk di dalamnya pemasukan kepada Kas Negara yang berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka **PARA PIHAK** akan melakukan kesepakatan kembali.

3. Melakukan perubahan Pasal 8 tentang Sanksi dan Denda yang semula sebagai berikut :

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat membayar uang sewa kepada **PIHAK PERTAMA** selama 30 (tiga puluh) hari setelah surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda karena keterlambatannya sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan. Pembayaran denda tersebut tidak menghapuskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan pembayaran sewa yang diperjanjikan.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ternyata **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan kembali obyek sewa menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** maka cukup dibuktikan dengan telah dilewatkannya waktu saja tanpa diperlukan teguran atau pemberitaan apapun atas keterlambatan tersebut **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda keterlambatan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung efektif mulai hari kelimabelas yang harus dibayar seketika dan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berubah Menjadi :

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian dalam rangka pengembalian ke dalam kondisi baik dan layak fungsi obyek sewa menyewa, dan/atau belum menyerahkan obyek sewa menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** ketika pelaksanaan sewa berakhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa surat teguran.
- (2) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran belum dilakukan tindak lanjut oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi berupa surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan belum dilakukan tindak lanjut oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian yang masih terutang atau sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran sewa sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung

PIHAK I :
PIHAK II :

dengan menggunakan periode sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan obyek sewa menyewa.

- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian maka wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan (bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh) dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan menggunakan akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan).
 - (5) Denda sebagaimana dimaksud pada poin (4) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (6) Pembayaran denda dilakukan melalui bendahara penerimaan yang melakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Negara.
4. Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.
 5. Hal-hal lain yang telah diatur dalam perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN MILITER UTAMA
Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda NIP. 197109051998032005

PIHAK KEDUA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARAC



Iwan Supriyanto
Pemimpin Cabang

PIHAK I :
PIHAK II : ✓



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820241227649362
Tanggal Billing : 27-12-2024 07:22:19
Tanggal Kedaluwarsa : 03-01-2025 07:22:19
Tanggal Bayar : **02-01-2025 14:58:46**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Overbooking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama
Kementerian/Lembaga : **005 - MAHKAMAH AGUNG**
Unit Eselon I : **01 - Badan Urusan Administrasi**
Satuan Kerja : **663161 - PENGADILAN MILITER UTAMA**
Total Disetor : 25.251.000 (IDR)
Terbilang : *Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **250102021082**
NTPN : **10C2361QV4JQG4AI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 25.251.000 (IDR)
Keterangan : Pembayaran Sewa ATM BRI Tahun 2025